

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara. Pembangunan di Indonesia selama puluhan tahun telah menghasilkan banyak sekali kemajuan, termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari paradigma pembangunan di Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang dimuat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam tiga poin, yaitu: 1) Asas kekeluargaan menjadi dasar dari perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama; 2) Negara menguasai segala cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup rakyat banyak; dan 3) Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Merujuk kepada ketiga poin tujuan pembangunan di atas, kita semua dapat memahami bahwa konsep pembangunan tidak akan pernah bisa lepas dari sumber daya manusia. Menurut Rahardjo (2008) perekonomian Indonesia pasca kolonial perlu adanya pendekatan prinsip demokrasi ekonomi dimana sangat menekankan pada partisipasi rakyat di segala bidang, baik sektor ekonomi besar maupun kecil sehingga dapat terwujud perekonomian yang mandiri. Perekonomian yang mandiri menjadi satu kunci keberhasilan pembangunan yang tidak dapat dipungkiri. Masyarakat yang

mau dan mampu berusaha sendiri, artinya mereka sadar bahwa tidak bisa selamanya bergantung pada negara dengan segala keterbatasan yang ada di saat tuntutan kebutuhan justru semakin banyak. Kemandirian masyarakat di bidang ekonomi ini, dapat menjadi pelumas bagi jalannya roda pembangunan di negeri ini.

Penjabaran di atas diperkuat dengan fenomena yang akhir akhir ini terjadi di Indonesia. Seperti yang dilansir dari surat kabar digital, Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan dalam rangka mencapai lima strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan isi berita, dapat dipahami bahwa, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah sudah menghadapi kendala keterbatasan, lalu apakah rakyat masih dapat bergantung dan mengharapkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat? Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut bergerak secara mandiri membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sebagai bagian penting dari paradigma pembangunan ini.

Salah satu bentuk kesadaran masyarakat untuk dapat bergerak secara mandiri adalah dengan membangun organisasi-organisasi informal yang tumbuh dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Kita perlu memahami satu fakta dari munculnya organisasi-organisasi informal ini adalah bahwa setiap manusia tidak dapat hidup tanpa memiliki hubungan sosial dengan manusia lainnya sehingga kebutuhan untuk dapat berasosiasi akan muncul dan

organisasi informal akan terbentuk, Daniel (2018). Organisasi informal dibangun oleh orang per orang yang memiliki kesadaran yang sama bahwa banyak permasalahan di lingkungan sekitar mereka dapat diselesaikan dengan baik melalui kerjasama di antara mereka yang terwadahi dalam sebuah struktur organisasi. Menurut Ancok (2003), organisasi sosial itu bersifat tradisional dan dibangun oleh masyarakat yang memiliki kepentingan bersama serta melibatkan para anggotanya dalam sebuah kontrak sosial. Selain itu, Ancok (2003) juga mengatakan bahwa mereka yang menjadi anggota organisasi sosial tersebut (yang merupakan bagian dari organisasi informal) memiliki ikatan kepentingan emosional dan sosial yang tidak menekankan pada kepentingan yang bersifat materi.

Keberadaan organisasi informal pada saat ini antara lain berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, asosiasi, dan lain sebagainya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) adalah salah satu bagian dari bentuk organisasi informal. APPSI adalah organisasi informal yang independen sebagai wadah bagi pedagang pasar untuk menampung aspirasinya, membuat rumusan kebutuhan serta melakukan upaya bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tujuan organisasi APPSI ini antara lain adalah memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar di seluruh Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuannya, sebuah organisasi harus menentukan strategi yang tepat dalam menjalankan program-programnya, selain itu organisasi juga membutuhkan suatu manajemen yang kompeten untuk dapat membentuk sebuah sistem

pengendalian dan perencanaan yang tepat (Sukmantari dan Wirasedana, 2015).

Komponen penting dalam proses perencanaan adalah anggaran. Menurut Nafarin (2008) yang dikutip dalam Moheri dan Arifah (2015), anggaran merupakan suatu rencana yang bersifat kuantitatif (dalam satuan jumlah) yang secara periodik disusun berdasarkan program yang telah disepakati sebagai alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam proses penyusunan anggaran, terdapat satu proses yang disebut sebagai pendekatan partisipatif penganggaran. Murray (1990) dalam Kewo (2014) menyampaikan definisi partisipasi sebagai dorongan dari dalam diri seseorang untuk merespon situasi yang terjadi dalam kelompoknya, sehingga ia melibatkan dirinya untuk memberikan sumbangan, baik pikiran maupun ide sebagai usaha untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditentukan. Keterlibatan anggota organisasi tersebut juga disertai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukannya. Sedangkan, menurut Hasniasari dan Sholihin (2014), partisipasi penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran dengan melibatkan berbagai pihak yang saling terkait dalam sebuah organisasi yang kemudian terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan anggaran ini dilaksanakan oleh APPSI di Pasar Imogiri, Pasar Piyungan, Pasar Bantul, dan Pasar Niten yang tercermin dalam program iuran sukarela yang dilakukan oleh para pedagang pasar setiap bulannya. Selain itu, terdapat keterlibatan para

pedagang pasar sebagai pengurus dan anggota APPSI dalam proses pengambilan keputusan penting di dalam organisasi. Para pedagang tidak hanya secara sukarela memberikan iuran dana, namun mereka secara aktif juga menyalurkan aspirasinya mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pasar. Sehingga, seluruh aspirasi yang tertampung tersebut menjadi dasar evaluasi serta penyusunan anggaran pada periode kerja selanjutnya. Proses evaluasi ini merupakan salah satu gambaran penerapan pengendalian intern yang dijalankan oleh pengurus APPSI.

Pendekatan partisipatif penyusunan anggaran ini memberikan pengaruh yang baik pada kinerja manajerial APPSI Pasar Imogiri, Pasar Piyungan, Pasar Bantul, dan Pasar Niten yang berdampak pada perbaikan sarana infrastruktur pasar serta meningkatnya kebersihan di lingkungan pasar yang memberikan rasa nyaman baik bagi para pedagang pasar maupun para pembeli. Fenomena yang menjadi latar belakang dari penjelasan di atas ini dapat dilihat dari perwujudan lingkungan yang bersih, sehat, serta suasana yang nyaman dan aman yang telah diupayakan oleh APPSI Pasar Imogiri sehingga mampu mengantarkan Pasar Imogiri menjadi pasar berpredikat terbaik dengan nilai mendekati 100% sempurna serta memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pernyataan tersebut merupakan hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto selaku Ketua Komisariat APPSI Pasar Imogiri pada tanggal 25 Mei 2019.

Selain itu, Ketua Komisariat APPSI Pasar Imogiri juga menyampaikan bahwa selama beberapa kurun waktu belakang ini, sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, Pasar Imogiri sudah tidak terlalu bergantung pada dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Para pengurus APPSI di Pasar Imogiri bersama-sama dengan pengelola pasar yang dipimpin oleh seorang lurah pasar, menyadari bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana seluruh pasar yang ada di Kabupaten Bantul. Kemandirian yang mampu dicapai oleh Pasar Imogiri ini merupakan buah dari usaha keras para pengurus APPSI sejak tahun 2005. Keberhasilan pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kinerja manajerial di dalam APPSI Pasar Imogiri telah meningkat dengan sangat baik.

Berikut ini adalah informasi awal yang penulis dapatkan berupa data pengeluaran untuk kegiatan perbaikan fisik fasilitas pasar yang dilaksanakan oleh APPSI Pasar Rakyat Imogiri pada tahun 2018:

Table 1.1

**D
a
t
a
P
e
m
a
n
f**

No.	Uraian	Nominal
1.	Perbaikan Talang Air	Rp 19.613.500
2.	Biaya Keamanan dan Kebersihan Pasar	Rp 47.700.000
3.	Perbaikan Saluran Air	Rp 3.275.000
4.	Perbaikan Saluran Listrik	Rp 504.500
5.	Biaya Pengadaan Kunci dan Perkakas	Rp 632.000
6.	Pembuatan Papan Rambu-rambu	Rp 1.236.000
7.	Pengadaan Pompa Air dan Mesin Sinso	Rp 2.290.000

ataan Iuran Anggota APPSI Pasar Imogiri

Sumber: Ikhtisar/Penjelasan Laporan Keuangan APPSI Komisariat Pasar Imogiri Tahun 2018 dalam Musyawarah Komisariat APPSI Tahun 2018

Untuk melengkapi data, penulis memperoleh data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terkait program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pasar. Penulis mengambil data dari empat pasar yang bertipe sama dengan Pasar Imogiri. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

Table 1.2
Data Perbaikan Infrastruktur Pasar Imogiri di Kabupaten Bantul

No.	Tipe Pasar A	Alamat Pasar	2018	2019
1.	Pasar Bantul	Kec. Bantul	Pengecatan Ternet	-
2.	Pasar Imogiri	Kec. Imogiri	Perbaikan Atap	-
3.	Pasar Niten	Kec. Sewon	Perbaikan Atap	Pembangunan Mushola Klitikan
4.	Pasar Piyungan	Kec. Piyungan	Talang dan Lampu	Rehab Talang Air

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Penjelasan mengenai data yang ada pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 diketahui bahwa pada tahun 2019, APPSI Pasar Imogiri berhasil mengambil perannya dalam mewujudkan ketersediaan sarana pasar yang layak sehingga dapat mendukung kegiatan jual beli di Pasar Imogiri. Namun, apabila melihat data tabel tahun 2018, Pasar Imogiri diketahui masih mendapatkan alokasi dana dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan rehab fisik pasar yaitu perbaikan atap. Sebagai

tindak lanjut atas kejadian tersebut, maka pada tahun 2019, seluruh pengurus APPSI Pasar Imogiri berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan kemandirian organisasi mereka untuk dapat membiayai sendiri setiap kegiatan maupun perbaikan infrastruktur di Pasar Imogiri. Hal tersebut dikarenakan kesadaran atas terbatasnya jumlah anggaran dari pemerintah daerah setempat. Sehingga, perbaikan atas kerusakan sarana fisik lainnya dapat diatasi sendiri oleh Pasar Imogiri.

Selain itu, fenomena di atas juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pengembangan Pasar dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang peneliti wawancara pada tanggal 8 Juli 2019, bahwa Pasar Imogiri selama tahun 2019 sudah tidak memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah setempat untuk kegiatan-kegiatan perbaikan fisik pasar yang berskala kecil, seperti perbaikan talang air, perbaikan saluran drainase, penyediaan peralatan pendukung lainnya seperti pompa air dan gerobak sampah. Hal tersebut dikarenakan Pasar Imogiri telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan hasil iuran dana para pedagang pasar dan meningkatkan kinerjanya baik kinerja para pengurus APPSI Pasar Imogiri maupun kinerja individu dengan merawat dan menjaga seluruh fasilitas pasar.

Selanjutnya, implementasi sistem pengendalian intern yang kuat dan kompeten menjadi satu aspek yang tidak kalah penting dari pendekatan partisipasi penganggaran. Pengendalian intern yang telah dilaksanakan oleh APPSI Pasar Rakyat Imogiri diantaranya melalui kegiatan musyawarah anggota APPSI Komisariat Pasar Rakyat Imogiri yang di dalamnya meliputi:

- Penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban beserta hasil pelaksanaan kegiatan intern APPSI Pasar Rakyat Imogiri
- Penyaluran aspirasi para pedagang Pasar Rakyat Imogiri melalui koordinator masing-masing zona tempat berjualan pedagang.

Informasi seputar kegiatan Musyawarah Anggota APPSI Komisariat Pasar Rakyat Imogiri tersebut penulis dapatkan dari Ketua APPSI Pasar Rakyat Imogiri yang diperkuat dengan adanya bukti dokumen berupa laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta laporan program dan kegiatan APPSI. Implementasi pengendalian intern yang disebutkan dalam poin-poin di atas ini, sesuai dengan definisi pengendalian intern yang disampaikan oleh Kewo dan Afiah (2017) yaitu sebagai proses penting dalam kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh anggota untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan.

Lalu, bagaimana sebuah organisasi informal seperti APPSI Pasar Rakyat Imogiri bisa berkembang sedemikian kuat dan mandiri, tentunya, selain karena telah mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen organisasi yang modern (pendekatan partisipasi penganggaran dan pengendalian intern) terdapat aspek lain yang secara dinamis berkontribusi memperkuat kelembagaan APPSI Pasar Rakyat Imogiri. Aspek tersebut adalah modal sosial dalam bentuk nilai-nilai yang membangun rasa saling percaya antara pengurus dan para anggota APPSI Pasar Rakyat Imogiri yang

dibuktikan dengan ketersediaan dana yang bersumber dari iuran anggota APPSI untuk melaksanakan program kerja APPSI, sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.1.

Modal sosial memang bukan suatu hal yang baru, namun konsep mengenai modal sosial ini sebetulnya sudah diajarkan oleh agama Islam seperti yang tercantum dalam Kitab Suci Al-Qur'an, Allah menyerukan kepada umat manusia melalui Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu."* (Al-Hujurat ayat 13).

Maksud dari potongan ayat di atas, Allah SWT menyerukan kepada umat manusia untuk saling mengenal dan bersuku-suku maupun berbangsa. Perkenalan antar dua atau lebih umat manusia itulah yang kemudian dapat kita sebut sebagai modal sosial. Sebagai contoh kedudukan modal sosial tercermin pada partisipasi secara sukarela dari masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk membangun dan mengembangkan sebuah pasar rakyat demi kesejahteraan seluruh pedagangnya tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai

dengan seruan Allah SWT dalam potongan ayat di atas, bahwa setiap manusia dianjurkan untuk dapat saling mengenal dengan baik. Dengan perkenalan itulah akan terjalin rasa saling menghormati, menghargai, dan membantu di antara sesama manusia seperti halnya dengan konsep modal sosial.

Organisasi didefinisikan oleh Griffin (2007) sebagai kombinasi dari orang atau usaha manusia dalam berkeja untuk mengejar tujuan umum tertentu yang disebut sebagai tujuan organisasi. Organisasi terbentuk oleh dua atau lebih manusia yang saling bekerja untuk mencapai sebuah tujuan. Organisasi dibedakan menjadi organisasi formal dan informal. Dalam penelitian ini, APPSI Pasar Imogiri, APPSI Pasar Piyungan, APPSI Pasar Bantul, dan APPSI Pasar Niten merupakan bagian dari organisasi informal. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Mullins (2010) berpendapat bahwa organisasi informal muncul secara alami dengan tujuan untuk dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan sosial dari setiap anggotanya. Sedangkan Schien (2010) yang dikutip dalam Daniel (2018) menyatakan alasan yang nyata mengapa seseorang secara individu mau menjadi anggota dalam sebuah grup yaitu dikarenakan mereka merasakan keintiman dengan kelompok itu dan memiliki beberapa karakteristik umum dengan keyakinan setiap individu.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa organisasi informal memiliki kesamaan dengan organisasi formal yaitu sama sama memiliki tujuan yang mendasari terbentuknya organisasi tersebut. Sehingga,

perencanaan yang terstruktur dan strategis serta pengendalian intern yang baik dan sesuai dengan karakteristik organisasi dibutuhkan setiap organisasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Daniel (2018) menyampaikan pendapatnya mengenai kinerja manajerial, menurutnya, kinerja manajerial berkaitan dengan harapan dan hasil yang diinginkan sebagai hasil dari kesatuan aktivitas-aktivitas, peran, tanggung jawab, serta fungsi yang dilakukan oleh organisasi melalui tenaga kerja, dalam hal ini adalah para anggota organisasi secara menyeluruh.

Keberhasilan pembangunan kelembagaan APPSI Pasar Imogiri sebagaimana yang telah disampaikan di atas, tidak lepas dari kinerja para pedagang pasar (secara individual) maupun kinerja manajerial APPSI (secara kolektif) yang semakin meningkat setiap harinya dikarenakan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya tujuan yang telah disepakati bersama. Kinerja manajerial APPSI di Pasar Imogiri yang dibuktikan dari kedua data pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di atas mampu membawa Pasar Imogiri memperoleh penghargaan Pasar Rakyat berpredikat sempurna mendekati 100% pada tingkat nasional. Berangkat dari penjelasan mengenai permasalahan dalam paradigma pembangunan serta munculnya konsep mengenai modal sosial, peneliti tertarik pada fenomena keberhasilan pembangunan kelembagaan APPSI di Pasar Imogiri dikarenakan organisasi tersebut mampu berdiri secara mandiri serta berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan pasar, dimana kontribusi tersebut secara langsung membantu pemerintah daerah setempat dalam upaya memperbaiki

infrastruktur sarana dan prasarana pasar serta memberdayakan dan mensejahterakan para pedagang di Kabupaten Bantul.

Melihat seluruh fenomena di atas, ada satu pertanyaan sederhana yang menggugah rasa ingin tahu peneliti mengenai apa saja yang menjadi dorongan bagi para anggota APPSI Pasar Rakyat Imogiri sehingga organisasi tersebut dapat berkembang dengan begitu baik dan mandiri? Satu pertanyaan itulah yang mendorong peneliti untuk mengambil topik penelitian mengenai partisipasi penyusunan anggaran, implementasi pengendalian intern, serta modal sosial yang memberikan pengaruh terhadap kinerja manajerial.

Keempat variabel penelitian itu, tidak lepas dari literatur-literatur penelitian yang serupa, bahwa rasa sukarela dari anggota organisasi dalam berpartisipasi maupun berkontribusi menyusun rencana serta tujuan organisasi dapat memotivasi para anggota organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, implikasi pada penerapan pengendalian intern organisasi yang salah satu komponen pokoknya berupa komunikasi dan informasi, dapat menjadi salah satu jawaban untuk pertanyaan utama penelitian ini, bahwa adanya komunikasi, keterbukaan satu sama lain, serta penyaluran informasi yang baik itulah yang mampu menjadi dorongan bagi para anggota organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu, peran modal sosial menjadi salah satu kontribusi penelitian dikarenakan belum ada penelitian terdahulu yang menempatkan modal sosial sebagai

variabel moderasi bagi partisipasi penganggaran dan implementasi pengendalian intern terhadap kinerja manajerial.

Kesenjangan (gap) yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah belum adanya penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh modal sosial sebagai variabel moderasi dalam topik partisipasi penganggaran dan pengendalian intern terhadap kinerja manajerial. Banyak literatur mengenai penelitian-penelitian terdahulu dengan topik serupa menggunakan konsep teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) seperti pada penelitian Hasniasari dan Sholihin (2014) dimana konsep tersebut menjelaskan pentingnya hubungan antara tujuan dan kinerja. Hubungan tujuan dan kinerja sulit untuk dapat saling mempengaruhi apabila tidak ada unsur rasa saling percaya, saling pengertian, solidaritas, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat setiap anggota dalam sebuah hubungan kerja serta komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama yang mana hal hal tersebut merupakan unsur dari konsep modal sosial. Meskipun penelitian terdahulu yang meletakkan konsep modal sosial sebagai variabel pemoderasi begitu minim, namun jika dikaitkan dengan fenomena yang ada yaitu keberhasilan pembangunan kelembagaan APPSI di Pasar Rakyat Imogiri yang telah dibahas sebelumnya, maka modal sosial dapat menjadi faktor penting yang memberikan pengaruh baik terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran maupun implementasi pengendalian intern terhadap kinerja manajerial. Hal tersebut dikarenakan, modal sosial yang membawa nilai-nilai

mutual trust, toleransi, solidaritas, serta kesamaan tujuan dan budaya dimiliki oleh para anggota organisasi APPSI di Pasar Rakyat Imogiri yang menjadi elemen penting terbentuknya organisasi informal tersebut.

Selain itu, argumen lain yang mendasari penentuan modal sosial sebagai variabel moderasi adalah pengamatan secara langsung terhadap kondisi pasar serta wawancara yang peneliti lakukan di awal studi empiris ini. Metodologi yang peneliti lakukan di awal penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara bersama Ketua Komisariat APPSI Pasar Rakyat Imogiri dan Kepala Bidang Pengembangan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang juga memberikan beberapa data terkait pemanfaatan alokasi anggaran dana pembangunan seluruh pasar di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan bukti-bukti mengenai hasil kinerja lembaga APPSI di Pasar Rakyat Imogiri berupa peraihan sertifikat SNI dengan nilai mendekati 100 sempurna. Selain itu, para pedagang pasar yang menjadi pengurus APPSI di Pasar Rakyat Imogiri sangat menjaga keutuhan lembaga mereka dikarenakan asosiasi pedagang tersebut dibentuk dan didirikan bersama dengan komitmen dan kesamaan tujuan untuk kesejahteraan sesama pedagang pasar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Cecilia Kewo & Nunuy Afiah (2017) serta Hasniasari & Sholihin (2014) yang menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran serta pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada badan

pemerintahan daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penambahan variabel modal sosial yang mana belum banyak digunakan sebagai pemoderasi dalam penelitian-penelitian yang serupa serta perbedaan subjek dan objek penelitian yang mengambil organisasi informal sebagai fokus studi empiris dalam penelitian ini. Penelitian ini menawarkan kontribusi penting mengenai keberadaan konsep modal sosial yang dinilai mampu memperkuat pengaruh dari proses pelaksanaan manajemen strategis dalam suatu organisasi berupa partisipasi penganggaran dan pengendalian internal terhadap kinerja manajerial organisasi sehingga organisasi-organisasi informal dapat mewujudkan *institutional building* melalui keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan bersama. Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Pada Asosiasi Pedagang Pasar dengan Modal Sosial Sebagai Variabel Moderasi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial?

2. Apakah implementasi pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial?
3. Apakah modal sosial dapat memperkuat pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial?
4. Apakah modal sosial dapat memperkuat pengaruh positif implementasi pengendalian intern terhadap kinerja manajerial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi penganggaran dan implementasi pengendalian intern terhadap kinerja manajerial dengan modal sosial sebagai variabel moderasi ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh positif secara langsung dari partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.
2. Menguji pengaruh positif secara langsung dari implementasi pengendalian intern terhadap kinerja manajerial.
3. Menguji pengaruh positif modal sosial terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja manajemen.
4. Menguji pengaruh positif modal sosial terhadap hubungan antara implementasi pengendalian intern dengan kinerja manajemen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Apabila hasil penelitian ini signifikan, diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam penelitian yang menguji pengaruh modal sosial sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh positif dari partisipasi penyusunan anggaran serta pengendalian intern terhadap kinerja manajerial dalam rangka pembangunan kelembagaan (*institutional building*).

2. Kontribusi Praktis

Bagi profesi akuntan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pentingnya penerapan penganggaran partisipatif serta implementasi pengendalian intern dalam sebuah organisasi. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi sebagai bahan diskusi mengenai besarnya pengaruh positif yang dihasilkan dari penerapan partisipasi penyusunan anggaran serta implementasi pengendalian intern dalam sebuah organisasi *non-formal* seperti asosiasi pedagang pasar. Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk membuktikan bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang baik dan berkontribusi dalam pembangunan kelembagaan, maka, diharapkan, para praktisi mampu menerapkan unsur-unsur modal sosial dalam kegiatan sehari-hari untuk dapat merasakan manfaat dari penerapan modal sosial secara nyata di lingkungan masyarakat.